

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formal Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia, 2014.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, *Op. Cit.*
- Eva Achjani Zulfa dan Indrayanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*, Bandung : CV. Lubung Agung, 2011, hlm. 47.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2005.
- Fockema Andrea, *Kamus Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983, terjemah.
- H.P.Panggabean, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori Praktik danYurisprudensi di Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2020.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta ,2020.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar ctk. Pertama, 2010.
- Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana : Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.

Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2015.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 “tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi”

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang “Komisi Pemberantasan Korupsi”

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang “Kekuasaan Kehakiman”  
SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung  
Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor:2614 K/Pid.Sus/2021.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2614 K/Pid.Sus/2021

Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor :2 /PID.SUS-TPK/2021/PT.TJK

Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 19/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Tjk

### **Jurnal/ Artilet**

- Armunto Hutahaean, *Strategi Pemberantasan Korupsi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.3, Juli 2020.
- Bettina Yahya, Budi Suhariyanto, & Muh. Ridha Hakim, *Urgensi dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi* (Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2017), Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017.
- Febri Handayani, “*The Pernicious Consequences Of Political Corruption In Indonesia*,” *Prophetic Law Review* 1, No. 1, 2019.
- Haswandi, “*Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia*”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 1 – Maret 2016.
- Hulman Panjaitan, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana To-ra: Volume 5 Nomor 2*, Agustus 2019, hlm, 91-103
- Nur Syarifah, “*Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*,” Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, terakhir diubah tahun 2015.
- Rudy Hendra Pakpahan & Aras Firdaus, “*Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum Dan Ius Constituendum*”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16. No. 3 - September 2019.
- Ridwan Arifin, Indah Sri Utari & Herry Subondo, “*Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada di Luar Negeri (Asset Recovery) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*,” *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJLCS)*, Vol 1, No 1, 2016.
- Riani Atika Nanda Lubis, *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Bentuk Penerapan Keadilan Restorative (Restorative Justice)*, (Depok : Universitas Indonesia, 2011).
- Sunny Shilby, “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NOMOR 1555K/PID.SUS/2019*,” *Volume 4 Nomor 1*, Juni 2021.

Susila Adiyanta dan Widyastuti, *Konsep dan Doktrin Hukum tentang Hukum Properti (Contract and Property Law), Tort Law, Kejahatan dan Hukuman: Perspektif Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum*, Administrative Law & Governance Journal, Volume 4 Issue 1.

Taufik Kemas, *Analisis Yuridis Perampasan Aset Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 7/Pid.Sus Tpk/2017/Pn.Mdn)*, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2019).

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Laporan Lokakarya tentang Pegembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi, 2009.

